

unuh, terlebih dengan banyaknya terpaan media yang agenda nya boleh jadi bertentangan dan memicu konflik serta perpecahan negeri tercinta.

## KESIMPULAN

Peta kesadaran geopolitik dan wawasan nasional masyarakat desa di Indonesia masih rendah, dan perlu intervensi media dalam mendongkraknya.

Pemanfaatan media sebagai sumber edukasi komunikasi berwawasan nasional oleh masyarakat desa masih rendah. Demikian juga intensitas program berisi wawasan nasional dan geopolitik bagi masyarakat masih sangat rendah.

Konsep strategi komunikasi nasional bagi pemberdayaan energi sosial masyarakat desa dapat dilakukan oleh Ditimas yang sudah dicanangkan sejak tahun 2006. Namun implementasinya belum berisi nilai-nilai berwawasan nasional dan geopolitik yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat desa di seluruh pelosok tanah air.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albert O. Hirschman. 1958. *The Strategy of Economic Development*.  
Ichlasul Anam, Armaidly Armani (ed). 1998. *Regionalisme, Nasionalisme dan Kebaharian Nasional*. Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.  
Kaedan & Ahmad Zuhaidi. 2007. *Pembelitan Kemasyarakatan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta : Penerbit Paradigma Yogyakarta.  
McQuail, Dennis. 1987. *Teori Komunikasi Massa ed. 2*. Jakarta: Erlangga  
Mahan, Alfred Thayer. *The Influence of Seapower on History*.  
Mansur Hamdan, Tjiptadi, Sobana. 2005. *Pembelitan Kemasyarakatan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.  
Soekanto, Soerjono. 1994. *Sosiologi Ruang Lingkup dan Aplikasinya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sumber lain :  
<http://www.detiknews.org>  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

## SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA

Dewi K. Soedarsono  
Telkom University – Bandung  
email : dsoedarsono@hotmail.com

## ABSTRAK

Indonesia tidak hanya dikenal dengan keindahan alam tapi juga dikenal dengan keragaman budaya masyarakat Indonesia. Dalam interaksi social, keragaman tersebut implikasinya menimbulkan konflik internal maupun horizontal.

Dalam tataran komunikasi, kemajemukan masyarakat Indonesia yang seringkali menimbulkan konflik antara budaya, dikaji melalui pendekatan teori sistem sosial dan sistem komunikasi; Selanjutnya dianalisis dari sudut pandangan pemerintah daerah, kementerian Informasi dan Komunikasi dan juga pimpinan media cetak.

Selanjutnya Pendekatan *gubernive* yang diimplementasikan ke dalam sistem komunikasi dipergunakan untuk bentuk komunikasi yang fleksibel

dipergunakan menjembatani perbedaan-perbedaan yang terdapat pada masing-masing daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Kata Kunci :** Interaksi sosial, sistem sosial, sistem komunikasi, sibernetika komunikasi

## PENDAHULUAN

Perbincangan mengenai ranah komunikasi, seakan tidak hanya seputar teknologi maupun media komunikasi; perbedaan status sosial, budaya maupun politik masyarakat Indonesia yang beragam berpotensi menimbulkan kesalahan pemahaman dalam aktivitas komunikasi; bahkan berpotensi memicu konflik antar suku, agama maupun budaya .

Kondisi tersebut merupakan salah satu permasalahan yang umumnya terjadi pada masyarakat Indonesia yang majemuk , dimana masyarakat Indonesia hidup dalam sistem masyarakat tradisional yang berada di pedesaan dan sistem masyarakat modern dipertanian .

“Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok, yang tinggal bersama dalam suatu wilayah, tetapi terpisah menurut garis budaya masing-masing. Kemajemukan suatu masyarakat patut dilihat dari dua variabel yaitu kemajemukan budaya dan kemajemukan sosial. Kemajemukan budaya ditentukan oleh indikator-indikator genetik-sosial (ras, etnis, suku), budaya (kultur, nilai, kebiasaan), bahasa, agama, kasta, ataupun wilayah. Kemajemukan sosial ditentukan indikator-indikator seperti kelas, status, lembaga, ataupun power”. (<http://setabasi01.blogspot.com/2012/04/indonesia-adalah-masyarakat-majemuk.html>; diakses pada tanggal 7 Oktober 2014).

Secara umum, kemajemukan seringkali dipersepsi sebagai biang keladi terjadinya konflik-konflik di Indonesia. Masing masing suku, ras maupun

budaya yang ada di Indonesia menganggap merasa lebih tinggi dan terhormat dibandingkan yang lainnya. Sebagai contoh konflik antar etnis/suku yang pernah terjadi antara suku Dayak dengan suku Madura di Sampit , suku Dani dan suku Moni di Papua ; suku Lampung dengan suku Jawa di Lampung Tengah beberapa tahun yang lalu; menunjukkan bahwa kemajemukan yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah beserta seluruh lapisan masyarakat Indonesia; agar konflik internal tersebut tidak muncul lagi.

Angga Mahendra dalam artikelnya berjudul “ Komunikasi antaretnik pada Masyarakat Multietnik di Kawasan Sunan Ampel Surabaya dalam kehidupan bertenaga “ , menjelaskan bahwa “Kehidupan majemuk bangsa Indonesia yang kompleks ditandai dengan kenyataan latar belakang sosial-budaya etnis yang berbeda-beda. Dengan kenyataan tersebut, tidaklah mudah bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu integrasi dan menghindari konflik atau bahkan perpecahan (DeVito, 1997:5). Berdasarkan pada pernyataan tersebut maka dapat dikatakan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa multietnik atau majemuk yang mengandung potensi konflik tinggi, baik itu konflik kepentingan, konflik ideologis, konflik antar kelas dan lain-lain.

Dalam masyarakat majemuk ini akan ada kelompok minoritas yang karena gangguan sosial dan kepentingannya akan menimbulkan suatu masalah baru yang dapat berkembang ke permukaan. Ketidakstabilan merupakan ciri khas yang melekat pada masyarakat majemuk yang memiliki keanekaragaman budaya sehingga hal ini menjadi satu bentuk adaptasi untuk melihat hubungan antar etnis.

Sejarah pertikaian antar etnis skala besar yang lain adalah pertikaian antara etnis Madura dan etnis Dayak di Kalimantan yang sampai terjadi dua kali (tragedi Sambas dan Sampit). Ribuan jiwa melayang, harta benda ludes, puluhan ribu orang menjadi pengungsi di negara sendiri. Social

Pendapat Alwi Dahlan, mencerminkan pentingnya sistem komunikasi yang khas keadaeran maupun khas Indonesia, agar dapat menjembatani pluraitas dan kemajemukan masyarakat Indonesia.

Beranjak dari fenomena tersebut, maka dengan pendekatan sistem sosial dan sistem komunikasi maupun kajian opini/ pendapat dari pelbagai pihak yang melakukan aktivitas komunikasi; kemudian dianalisis melalui pendekatan siberetecik komunikasi dan dideskripsikan sesuai dengan teori yang mendukung penulisan ini; kiranya dapat menjadi solusi untuk diimplementasikan untuk menciptakan sistem komunikasi yang khas keadaeran maupun khas Indonesia

## TINJAUAN PUSTAKA

Pada Pembukaan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa "bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan keluhusan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) .

Penjelasan dalam UU No. 32 tahun 2004 tersebut, diterbitkan oleh pemerintah untuk menekankan pentingnya kebersamaan dan persatuan dalam membangun daerahnya masing-masing, sesuai dengan kebudayaan maupun adat istiadatnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kerukunan dalam bermasyarakat.

Kehidupan bermasyarakat, galibnya merupakan interpretasi dari bergabungnya serangkaian aktivitas kehidupan sosial yang melibatkan

individu dan secara perlahan membentuk kehidupan sistem sosial.

Menurut Nasikun (1995:27), "Sistem sosial di Indonesia dapat dipandang melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan fungsionalisme struktural dan pendekatan konflik. Untuk menganalisis keadaan masyarakat Indonesia, diperlukan kesinergian dari kedua pendekatan tersebut. Sebab, pada dasarnya masyarakat Indonesia bersifat majemuk, sehingga dipertukan berbagai perspektif untuk memahaminya. Kemajemukan dan juga ketegamaan suku budaya dan juga bahasa yang ada didalam negara Indonesia bukanlah sebuah hal ataupun permasalahan yang baru. Struktur sosial masyarakat Indonesia sendiri ditandai dengan dua ciri yang bersifat unik, secara horizontal, ia ditandai dengan kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku-bangsa, agama, adat dan juga perbedaan-perbedaan yang terjadi di daerah-daerah. Sedangkan secara vertikal, struktur sosial masyarakat Indonesia ditandai dengan adanya perbedaan-perbedaan antara lapisan bawah dan juga lapisan atas yang cukup tajam. Struktur sosial masyarakatnya yang tergolong majemuk inilah yang kemudian diklaim sebagai salah satu warisan sosial Indonesia yang kemudian memunculkan resiko yang cukup tinggi akan adanya konflik yang diakibatkan karena adanya benturan perbedaan kepentingan, perspektif, ide dan juga keinginan dari masing-masing lapisan masyarakat di Indonesia.

Masyarakat majemuk sendiri adalah suatu masyarakat dalam mana sistem nilai yang dianut oleh berbagai kesatuan sosial yang menjadi bagian-bagiannya adalah sedemikian rupa sehingga para anggota masyarakatnya kurang memiliki loyalitas terhadap masyarakat sebagai sebuah kesatuan atau keseluruhan dan juga kurang memiliki homogenitas kebudayaan atau bahkan kurang memiliki dasar-dasar untuk saling memahami satu sama lain (Furnivall dalam Nasikun 1995: 32). Kemajemukan atau keberagaman yang dimiliki Indonesia terlihat cukup jelas dibuktikan dengan adanya perbedaan yang terjadi di berbagai suku-suku, bangsa-bangsa, perbedaan agama atau kepercayaan, dan juga serta menunjukkan bahwa tidak adanya kehendak

yang diberikan oleh suatu kebudayaan tertentu terhadap kebutuhan individu. Jadi Orientasi nilai menunjuk pada standar-standar normatif yang mempengaruhi dan mengendalikan pilihan-pilihan individu terhadap tujuan yang dicapai dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Singkatnya, kebebasan individu dalam bertindak dibatasi oleh standar-standar normatif yang ada dalam masyarakat.

Berdasarkan paparan mengenai pengertian "sistem sosial", maka dapat disimpulkan bahwa sekelompok masyarakat yang saling berbeda latar belakang secara konstan melakukan interaksi social dan membentuk norma, nilai maupun aturan-aturan yang telah disepakati bersama, berdasarkan struktur maupun fungsinya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam Perspektif Komunikasi, struktur maupun fungsi yang terbentuk dari hubungan maupun interaksi sosial di dalam kelompok masyarakat ; merupakan sebuah proses yang berkesinambungan membentuk suatu sistem komunikasi.

Nurudin (2004) di dalam bukunya yang berjudul Sistem Komunikasi Indonesia, menjelaskan bahwa corak sistem komunikasi di dalam masyarakat Indonesia akan sangat ditentukan oleh corak, bentuk dan keragaman masyarakat Indonesia itu sendiri, yaitu :

Jika ditinjau dari segi wilayah geografisnya, sistem komunikasi bisa dibagi menjadi dua, yakni sistem komunikasi di pedesaan dan perkotaan. Di Indonesia realitas komunikasi di perkotaan dengan di pedesaan sangat berbeda jauh. Di desa, sistem komunikasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan *opinion leader* (pemimpin opini, pemuka pendapat) sebagai pihak penjenjrah pesan, interpretator karena kebutuhannya dibandingkan masyarakat kebanyakan. Adapun masyarakat kota, sistem komunikasi sangat dipengaruhi oleh keberadaan media massa mengingat ciri masyarakat kota lebih individualis dibandingkan masyarakat desa. Ini juga sejalan dengan tingkat perkembangan pendidikan warga kota yang memungkinkan mereka lebih bergantung pada media massa.

Jika ditinjau dari media yang digunakan, ada sistem media cetak (surat kabar, majalah, tabloid), sistem media elektronik (televisi, radio), dan sistem media online atau internet. Di samping itu ada pula sistem media tradisional, misalnya saja wayang, ketoprak, ludruk atau bentuk folklor antara lain: (1) cerita prosa rakyat (mite, legenda, dongeng), (2) ungkapan rakyat (peribahasa, pepatah), (3) puisi rakyat, (4) nyanjian rakyat, (5) teater rakyat, (6) gerak isyarat, (7) alat pengingat dan (8) alat bunyi.

Jika ditinjau dari pola komunikasinya ada sistem komunikasi dengan diri sendiri (*intrapersonal communication system*), sistem komunikasi antarpersona (*interpersonal communication system*), sistem komunikasi kelompok (*small group communication system*), dan sistem komunikasi massa (*mass communication system*).

Paparan Nurudin tersebut, menjelaskan bahwa sistem komunikasi yang terjaln dalam interaksi social di masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh geografis dimana masyarakat itu berada yaitu masyarakat pedesaan maupun perkotaan ; dan masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda ; selanjutnya media yang dipergunakan dalam interaksi tersebut juga dipengaruhi lelak geografis dimana masyarakat itu berada , masyarakat perkotaan lebih banyak menggunakan media modern sedangkan masyarakat pedesaan menggunakan media yang bersifat tradisional. Selanjutnya pola komunikasi yang terjadi bergantung kepada bentuk aktivitas individu maupun anggota kelompok dalam masyarakat yang saling berinteraksi .

Sistem yang terjaln dalam aktivitas komunikasi, merupakan serangkaian proses dalam unsur-unsur komunikasi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk suatu sistem . Sehingga implementasi dalam kehidupan social masyarakat Indonesia secara tidak langsung dipengaruhi oleh sistem social yang menjadi dasar berlangsungnya kehidupan social masyarakat Indonesia , sistem politik dan falsafah bangsa yang mengatur kehidupan bernegara masyarakat Indonesia .

Selanjutnya untuk mengadapasikan kemajemukan masyarakat Indonesia

kedalam sistem komunikasi yang khas kedokteran maupun klas Indonesia diperlukan maka pendekatan sistem ini sendiri menurut Stephen W.Littlejohn (1996) mengandung karakteristik, sebagai berikut :

*System Quality* (kualitas sistem) , dimana masing-masing bagian atau unit unit saling membantu memberikan pengertian kepada yang lainnya .

*Wholeness and Interdependence* (Keseluruhan & ketergantungan), dimana keseluruhan dari suatu sistem yang meliputi objek, konsep orang atau bagian lain selalu tergantung pada objek, orang, maupun konsep lain; dan ketergantungan ini menciptakan sebuah organisasi sistem.. Suatu sistem adalah suatu keseluruhan karena bagian-bagiannya berhubungan satu sama lain dan tidak dapat dipahaminya secara terpisah.

*Hierarchy* (Hirarki) , suatu sistem adalah bagian dari suatu sistem yang lebih tinggi, suatu sistem adalah suatu rangkaian level kompleksitas yang makin bertambah. Sistem yang lebih besar dari suatu bagian sistem disebut supra sistem, dan sistem yang lebih kecil yang mengandung suatu sistem disebut subsistem.

*Self Regulation and Control*, Sistem seringkali dipandang sebagai organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Aktifitas-aktifitas suatu sistem dikendalikan oleh tujuan dari sistem itu, yang mengatur perilakunya untuk mencapai tujuan tujuan tersebut. Bagian-bagian dari suatu sistem harus berpelaku berdasarkan secara garis besar adaptasi terhadap umpan balik tergantung pada lingkungannya.

*Interchange with the environment*, bahwa sistem terbuka (*open systems*) berinteraksi dengan lingkungan, dimana sesuatu yang terjadi dan energi melalui proses masukan dan keluaran.

*Balance*, Keseimbangan seringkali merujuk kepada istilah homeostasis, self maintenance, dimana menunjukkan salah satu tugas sistem adalah menciptakan keseimbangan. Sebuah sistem harus dapat mendeteksi kerusakan dan

membuat penyesuaian kembali terhadap penyimpangan maupun perubahan yang muncul yang dapat ditolerir oleh suatu sistem. dengan kata lain sebuah sistem harus dapat merawat diri sendiri jika terjadi sesuatu penyimpangan atau perubahan.

*Change and Adaptability*, Sistem selalu masuk dalam lingkungan yang dinamis, sehingga sistem harus mampu beradaptasi. Sebaliknya , untuk mempertahankan hidup, suatu sistem harus memiliki keseimbangan tapi juga harus mampu berubah.

*Equifinality* , Penyelesaian mencapai sasaran atau prestasi adalah tugas suatu sistem. Pengertian Equifinality dimana menyelesaikan suatu keadaan dapat dilakukan dengan cara-cara yang berbeda dan dari titik awal yang berbeda. (disarikan dari : Stephen W.Littlejohn : 1996).

Berdasarkan paparan tersebut, maka untuk mendapatkan bentuk sistem komunikasi yang sesuai kedokteran maupun klas Indonesia , maka bila aspek aspek yang terdapat dalam sistem social tersebut sudah terpenuhi sesuai dengan persyaratan " sistem " seperti tersebut di atas, kemudian diimplikasikan kedalam proses komunikasi yang sesuai dengan bentuk interaksinya, apakah bentuk komunikasi antar personal, komunikasi dengan kelompok maupun komunikasi menggunakan media dan karakteristik masyarakat yang terlibat dalam interaksi social tersebut , apakah masyarakat perkotaan maupun pedesaan .

Berdasarkan paparan tersebut, maka untuk mengkaji sejauhmana Sistem Komunikasi dapat mengadopsi kepentingan kepentingan individu maupun kelompok dalam interaksi social , maka pengelajarannya melalui pendakaran yang dikenal dengan istilah *Cybernetics* (kibernetika) , adalah kajian mengenai regulasi dan kontrol dalam system, dan ditekankan pada umpan balik (*feedback*).

Dalam konsep kibernetika tersebut, aspek umpan balik merupakan factor penentu apakah sistem berjalan sesuai dengan aturan aturan dan

kesesuaian saat interaksi social berlangsung ; sedangkan dalam perspektif komunikasi, aspek feedback merupakan salah satu factor untuk mengetahui apakah komunikasi berjalan sesuai dengan tujuannya .

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejalan dengan Undang – Undang No.32 tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah, pada pasal 5 dan pasal 6, dijelaskan bahwa daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa setiap daerah mempunyai otonomi sendiri dalam kehidupan bernegara maupun interaksi social , dengan tujuan untuk mejalin kehidupan bersama dalam masyarakat yang majemuk di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, sistem komunikasi yang terbentukpun di dasarkan pada hak, wewenang dan tanggung jawab aparat pemerintah daerah setempat sebagai landasan untuk mengatur pola komunikasi yang terjalin dalam sistem social yang berlaku di daerah setempat, untuk selanjutnya diimplementasikan ke dalam sistem komunikasi yang dapat dijalankan sesuai dengan kebijakan otonomi daerah .

Di era reformasi dan globalisasi saat ini, perkembangan sistem komunikasi tentunya akan dipengaruhi oleh sistem teknologi komunikasi yang semakin maju, diantaranya teknologi media internet .

Menurut pandangan Daud Achmad sebagai Staf Ahli Gubernur Jawa barat, menjawab pertanyaan mengenai perkembangan system komunikasi di dalam pemerintahan daerah, sebagai berikut “ System komunikasi di

era reformasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada dasarnya berjalan sebagaimana hal nya komunikasi pada suatu organisasi. Namun demikian seiring dengan berlakunya UU tentang Keterbukaan Informasi, maka komunikasi eksternal dengan masyarakat berjalan lebih transparan. Media komunikasi berbasis Teknologi Informasi seperti Website Jabarprov. go.id digunakan sebagai media informasi bagi masyarakat maupun media komunikasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Prov Jawa Barat. System komunikasi di Pemprov Jawa Barat terus dibangun dan dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi dan memudahkan pelayanan bagi masyarakat. “ (wawancara tertulis pada tanggal 28 september 2014).

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pada era keterbukaan saat ini, pemerintah daerah menekankan aspek dalam sistem komunikasi kepada pemanfaatan media komunikasi dengan efisien dan efektif .

Selanjutnya Amin Saragih Manihuruk (Peneliti Madya Bidang Komunikasi dan Media/Badan Litbang SDM Kominfo) membenarkan pandangan bahwa “ selama memasuki Era reformasi, sistem komunikasi di lembaga kami (Kemen Kominfo RI) cenderung lebih terbuka, baik antar unit kerja maupun ke luar lembaga. Terutama antara bawahan kepada atasan keterbukaan dan keberanian menyampaikan aspirasi sangat signifikan bedanya jika dibandingkan dengan era ORBA. Kemudian sistem komunikasi sudah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi mutakhir. Namun yg dirasakan masih kurang adalah pelayanan informasi social kepada masyarakat. Hal in terjadi karena secara structural Kominfo tdk mempunyai jaiungan ke daerah2, hanya ada hubungan yg bersifat fungsional” . (Wawancara tertulis tanggal 04 Oktober 2014).

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut dapat dijelaskan pendekatan sistem komunikasi di pemerintahan daerah dalam hal ini Jawa barat maupun di departemen Komunikasi dan Informasi, lebih menekankan kepada aspek penggunaan sistem teknologi komunikasi sebagai salah satu media

untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan pemerintah maupun informasi lainnya.

Berbeda dengan pernyataan Islamiar Pemasa (Pemimpin Redaksi Harian Umum "Pikiran Rakyat"), menjelaskan pandangannya mengenai sistem komunikasi di era reformasi, "Sistem komunikasi pasca reformasi bisa dilihat dari dua perspektif, demokratisasi dan berkembangnya platform dan media komunikasi. Demokratisasi terjadi pada pembuatan pesan, media, dan penerima pesan itu sendiri. Semua memiliki peluang yang sama untuk masuk dalam komponen mana pun dalam sistem komunikasi publik. Hal ini didorong pula oleh berkembangnya platform yang memungkin setiap orang membuat, memilih dan memproduksi konten dan berinteraksi". (Wawancara tertulis pada tanggal 30 September 2014).

Pernyataan tersebut lebih menegaskan pada sistem politik yang menjadi landasan dalam menetapkan proses pembentukan sistem komunikasi yaitu melibatkan aspek pembuatan pesan, isi pesan, media dan penerima pesan.

Menyitir pernyataan Paradigma Stephen W. Little John (1996) bahwa dalam sistem terdapat seperangkat hal-hal yang berhubungan satu sama lain dan membentuk suatu keseluruhan, yang meliputi *System Quality, Wholeness and Interdependence, Hierarchy, Self Regulation & control, Interchange with the environment, balance, change & adaptability, Equifinality*.

Sedangkan pendekatan *Cybernetics* (Kibernetika) dilakukan untuk memperoleh pencapaian sasaran tertentu melalui pengukuran dan penyesuaian terhadap proses dalam sebuah sistem, yaitu suatu konsep sentral dalam sistem yang menjelaskan kualitas-kualitas secara keseluruhan dari proses sistem dalam merespon *feedback positif dan feedback negatif* dalam melakukan pertukaran atau pengadapasian lingkungan.

Maka untuk mengkaji pendapat pendapat/opini mengenai sistem komunikasi dari aspek pemerintahan dan perusahaan media (pemda Jawa

Barat, KOMINFO dan HU Pikiran Rakyat), dimana interaksi social lebih difokuskan pada pemanfaatan media komunikasi dan proses terbentuknya sistem komunikasi; maka pengelawatnahan dari pendekatan sistem itu sendiri sebagai berikut: Unsur Komunikator sebagai sumber maupun penyampai pesan, kredibilitasnya dapat dipertanggung jawabkan dan berkualitas (*System Quality*); selanjutnya pada proses pembuatan pesan komunikator mempertimbangkan bahwa isi pesan mampu mewakili seluruh informasi dan disampaikan dengan sistematis dan berkesinambungan (*Wholeness and Interdependence*); agar pesan dapat sampai sesuai tujuan – maka komunikator perlu mengkaji sedemikian rupa peran komunikator dalam proses komunikasi tersebut dan menetapkan kepada siapa yang berhak menerima pesan tersebut (*Hierarchy*); proses selanjutnya adalah mengevaluasi sejauhmana pesan maupun informasi yang disampaikan sesuai dengan situasi dan kondisi saat komunikasi berlangsung (*Self Regulation & Control*); sejalan dengan karakteristik masyarakat yang majemuk, dimana situasi maupun kondisi dapat berubah maupun tidak sesuai dengan yang telah direncanakan; maka seluruh aspek dalam proses komunikasi perlu mempertimbangkan factor lingkungan dimana interaksi tersebut berlangsung; sehingga dalam pelbagai keadaan sistem dalam proses komunikasi dibuat fleksibel (*Interchange with the environment*); untuk menciptakan keseimbangan dalam penyampaian informasi yang penting untuk menjaga agar pesan dapat dipetepsi dengan positif maka isi pesan perlu dikaji ulang, salah satunya dengan analisa SWOT maupun menggunakan rumus 5 W + 1 H (*Balance*); mengingat besarnya keragaman budaya maupun latar belakang pada saat terjadinya aktivitas komunikasi, maka semua elemen dalam proses komunikasi dipersiapkan untuk mampu melakukan perubahan perubahan dan mampu beradaptasi dengan segala perbedaan atas perubahan tersebut (*Interchange & adaptability*); Implementasi dari sistem komunikasi adalah adanya kestabilan dan kemampuan dalam yang terbentuk dari unsur unsur yang terlibat dalam proses komunikasi,

sehingga sistem komunikasi yang terbentuk pada akhirnya dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan konflik maupun perbedaan pandangan yang terjadi dalam aktivitas komunikasi antar budaya (*Egnyfahby*).

Paparan tersebut menjelaskan secara umum, implementasi konsep sistem dari Little John kedalam elemen-elemen yang ada dalam proses komunikasi sebagai sebuah sistem komunikasi; selanjutnya pendekatan cybernetic (kibernetika) lebih difokuskan untuk mengkaji aspek media komunikasi, sebagai salah satu bagian dari sistem komunikasi; dimana hasilnya adalah untuk mengukur media komunikasi yang dipergunakan beserta *feedback* yang diharapkan dari para pelaku komunikasi.

Berikut beberapa pendapat mengenai akibat perkembangan teknologi komunikasi atau media komunikasi terhadap interaksi social :

Islamirur Pempasa menjelaskan bahwa, " dari segi hubungan profesional dan personal, teknologi komunikasi memungkinkan kecepatan dan kelingkasan jarak dalam menyampaikan dan menerima pesan komunikasi. Terhadap aktivitas sosial, beragam platform yang muncul memungkinkan masyarakat terhubung terutama dengan relasi yang berjarak. Intensitas pertukaran informasi menjadi lebih tinggi, termasuk dalam aktivitas keseharian dan sosial yang dilakukan". (Wawancara tertulis pada tanggal 30 September 2014).

Daud Achmad berpendapat bahwa, "Dengan berkembangnya media sosial di masyarakat, maka Pimpinan Daerah dalam hal ini Gubernur dan para pejabat dibawahnya, juga membuka account, misalnya di Twitter. Hal hal yang disampaikan oleh masyarakat, biasanya segera direspon dengan tindakan langsung mengatasi masalah tersebut atau tindakan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Media Sosial bagi Pemprov Jabar adalah membantu percepatan penyampaian informasi dari masyarakat kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, media sosial dapat dijadikan juga sebagai media penyampaian informasi bagi masyarakat". (Wawancara

tertulis pada tanggal 28 September 2014).

Selanjutnya Amir Saragih menyatakan bahwa, " Perkembangan Sosial media sebagai media komunikasi terbuka antar anggota masyarakat sudah pasti ada sisi positif dan negatinya, tergantung manusianya dimanfaatkan untuk apa media itu. Banyak kasus di lembaga kami bahwa media social itu belum maksimal dimanfaatkan sebagai sumber informasi/pendidikan dan diseminasi informasi/data yg bermanfaat bagi public. Oleh karena itu, ke depan disarankan utk melakukan pendidikan/sosialisasi tentang peningkatan literasi media social kepada berbagai potensi masyarakat, sehingga bias mengurangi efek negative media social tersebut. (Wawancara tertulis pada tanggal 4 Oktober 2014).

Berdasarkan pernyataan ke tiga nara sumber tersebut dapat disimpulkan, bahwa kebutuhan media komunikasi untuk mempermudah proses penyampaian informasi dalam kegiatan komunikasi memegang peranan penting dan alat yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi komunikasi tersebut, bergantung kepada masing-masing individu yang terlibat dalam sistem komunikasi tersebut. Selanjutnya, pendekatan *Cybernetic* dipergunakan untuk mengkaji aspek positif maupun negative dari elemen-elemen dalam media komunikasi. Unsur unsur yang ada dalam sistem *Cybernetic* memungkinkan secara mudah diadaptasikan kedalam proses pemilihan maupun penyampaian pesan melalui media komunikasi.

## KESIMPULAN

Interaksi Sosial di dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, memerlukan sistem komunikasi yang khas daerah maupun khas Indonesia. Keberagaman pola budaya, nilai maupun cara berkomunikasi yang berbeda antar suku yang satu dengan suku yang lainnya, dikaji melalui pendekatan sistem social.

Sedangkan untuk menciptakan bentuk komunikasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi pada interaksi social antara suku yang berbeda di Indonesia, dilakukan dengan mengkaji elemen ataupun unsur yang ada dalam proses komunikasi tersebut; dan pendekatan kibernetika dibutuhkan untuk lebih memantapkan bentuk sistem komunikasi yang dapat diadopsi ke dalam beragam aktivitas komunikasi maupun penggunaan media komunikasi.

Menyirir Pendapat M.Yahya Arwiyah (Dr Pendidikan Kewarganegaraan dan Wakil Rektor IV Univ.Telkom) mengenai perkembangan sistem komunikasi di Indonesia, " Terdapat kecenderungan menurunnya tingkat penghargaan antar manusia yang pada hakikatnya mempunyai strata dan batasan, dikaitkan dengan status sosial, Agama dan latar belakang pendidikan. Selanjutnya Pola komunikasi didalam suatu negara biasanya dipengaruhi oleh sikap dan pandangan hidup bangsanya dan system politik yang berlaku; walaupun tidak mutlak, namun memang mempunyai pengaruh yang cukup dominan. Pancasila merupakan Landasan Hidup masyarakat Indonesia, sehingga nilai nilai yang terkandung dalam tiap-tiap sila dari Pancasila mempunyai implikasi khusus pada kegiatan komunikasi masyarakat Indonesia. Maka dalam berkomunikasi tetap harus memperhatikan kearifan lokal, ajaran agama dan kepatutan serta kebiasaan yang dipengaruhi oleh adat istiadat. (Wawancara tertulis pada tanggal 02 Oktober 2014).

Akhir kata, keragaman budaya di Indonesia merupakan kekayaan yang tidak dimiliki oleh Negara lain; dengan terbentuknya sistem komunikasi yang fleksibel diimplementasikan pada interaksi social antara kelompok budaya di Indonesia, diharapkan mampu mengangkat harkat dan martabat Indonesia di mata dunia.

#### DAFTAR PUSTAKA

Bertalanffy, Ludwig Von, 1968, " General System Theory ", New York, George Braziller.

- Effendy, Onong Uchjana, 1981, " Sistem informasi dalam Manajemen ", Bandung, Alumni.
- Gartner Roberta, 2000, " Social Theory: Continuity and Confrontation ", Canada, broadview press
- Nasitun, 1995. "Struktur Majemuk Masyarakat Indonesia" dalam Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nasitun. 1995. "Struktur Masyarakat Indonesia dalam Masalah Integrasi Nasional dalam Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lauter, Robert H, 2001, " Perspektif tentang Perubahan Sosial", terjemahan Alimandan, Jakarta, Rineka Cipta.
- Lintjeohn, Stephen W, 1996, " Theories of Human Communication ", USA, Wadsworth Publishing Company.
- Martindale, Don, 1960, " The Nature and Types of Sociological Theory ", Boston, Houghton Mifflin company.
- Nisfar, Karhi & Winardi, 1997, " Teori sistem dan Pendekatan Sistem dalam Bidang Manajemen ", Bandung, Mandar Maju.
- Ritzer, George, 1992. " Sociological Theory. USA: McGraw- Hill, Inc
- Ritzer, George, 2003, " Teori social modern. Terjemahan. Jakarta : Prenada Media
- <http://skaterfm.blogspot.com/2012/04/permasalahan-kemajemukan-masyarakat.html>, diakses pada tanggal 05 september 2014.
- <http://nasional.kompas.com/read/2011/11/09/15512862/> diakses pada tanggal 28 September 2014.
- <http://setrabasri01.blogspot.com/2012/04/indonesia-adalah-masyarakat-majemuk.html>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2014.
- [http://journal.unair.ac.id/article\\_4634\\_medial37\\_category8.html](http://journal.unair.ac.id/article_4634_medial37_category8.html); diakses pada tanggal 10 Oktober 2014.
- [http://louis-cmbun-fisip13.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-105540-Studi-Strategis-Indonesia-I-week-10-Struktur-Masyarakat](http://louis-cmbun-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-105540-Studi-Strategis-Indonesia-I-week-10-Struktur-Masyarakat), diakses pada tanggal 12 Oktober 2014.
- <http://laely-widjajati.blogspot.com/2010/01/pengertian-sistem-sosial-menurut.html>; diakses pada tanggal 12 oktober 2014.